

Budaya Massa dalam Masyarakat *Bengong*

Ciri paling menonjol kebudayaan Indonesia masa kini adalah kebhinnekaan kelompok sosial dan budaya yang merupakan hasil perjuangan terhadap mekanisme penunggalan yang dilakukan oleh feodalisme, kolonialisme, modernisme dan otoriterisme. Untuk ke depan apakah masih ada kebebasan dalam kebhinnekaan budaya di tengah arus gempuran sistem kapitalis dunia? Beberapa masyarakat di dunia sekarang barangkali dapat dijadikan contoh bagaimana keberhasilan mereka melawan dominasi sistem dan budaya massa kapitalis. Tetapi evaluasi perlawanan terhadap budaya massa dominan selayaknya tetap tidak melupakan faktor-faktor keberhasilan industrialisasi, tradisi bak-asasi manusia, la conscience possible warganegara dan penolakan pada dogmatisme.

Doris Pandjaitan

Peneliti Lepas



Doris Pandjaitan, lahir di Pekanbaru, 29 November 1953; meraih gelar Sarjana dari FIS-UI (1980) dan bekerja sebagai wartawan sebelum berangkat ke Paris (1989); menyelesaikan tesis kandidat doktor tentang televisi di Indonesia (1993) dari jurusan l'Histoire et Civilisation pada l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris; kini tengah menyelesaikan disertasi tentang l'Ideologie et Télévision di Universitas Blaise Pascal, Clermont Ferrand, Perancis.

Ketika memotret kebudayaan Indonesia masa kini, kita lantas berhadapan dengan ciri-cirinya yang paling menonjol yaitu *kebhinnekaan* berbagai kelompok sosial dan budaya, di samping keinginan untuk tetap memelihara *jati-dirinya*, kendati pembauran telah terjadi di sana-sini selama perjalanan waktu dan sejarah hidup berbangsa. Misalnya, arus penyeragaman lewat *unifikasi* di bidang pendidikan melalui pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian, tanpa mengurangi hormat kita atas usaha-usaha menyatukan bangsa, dalam kenyataannya untunghlah masih tersisa berbagai penggunaan bahasa daerah dan sekurang-kurangnya 5 agama yang diakui resmi oleh pemerintah. Kebhinnekaan bahasa, budaya dan agama ini, sedikitnya dapat menggambarkan sejarah perlawanan, hasrat dan pengalaman hidup sosial sejumlah besar manusia Indonesia yang justeru ingin tetap mempertahankan *bak budaya* yang berciri kebhinnekaan, dalam sistem politik dominan manapun. Dengan kata lain, kebhinnekaan/toleransi budaya dan agama adalah hasil perjuangan manusia Indonesia terhadap sejarah *mekanisme penunggalan* masyarakat, yang

di dalam proses *produksi* dan *reproduksi* masyarakat Nusantara dilakukan melalui mesin sistem dominan yaitu: feodalisme, kolonialisme, modernisme dan autoritarisme.

Pertanyaannya, masih adakah kebebasan untuk mempertahankan kebhinnekaan budaya kita dalam dunia yang makin kecil dan transparan serta lagi-lagi harus berhadapan dengan sistem yang sangat dominan, tertutup dan sangat terorganisasi, yang tersohor dengan sebutan sistem kapitalis dunia?

Budaya Populer, Budaya Massa yang Dominan

Sejak zaman dahulu, manusia selalu hidup berkelompok sehingga Robinson Crusoe mungkin hanya ada di alam fiksi. Masyarakat terkecil disebut keluarga, kemudian dapat disebut berurut sesuai jumlah kelompoknya: klan, desa, suku, daerah dan negara. Tata cara hidup bermasyarakat juga sudah sangat tua. Contoh terkenal *code Hammurabi* yang sering dianggap sebagai yang tertua (1730 S.M), yang prasasti peninggalannya masih dapat dilihat di museum Louvre, Paris. Puncak peradaban Babylon ini mengandung 282 aturan yang antara lain berisi hukum kriminal, hukum keluarga (status istri, hak waris, dan lain-lain), hukum hak milik dan hukum pertukaran barang-barang yang sangat mendorong usaha perdagangan. Dalam bidang sosial masyarakat waktu itu kita mengenal tiga kelas, yaitu manusia bebas, manusia pekerja (terikat) dan budak.

Ternyata kehidupan berkelompok (keluarga, klan, suku, dan seterusnya) sejak jaman dahulu selalu memiliki visi tentang: hidup, mati, wanita, badan, upacara, pesta, kasta, pembagian kerja, perkawinan dan lain-lain aspek kehidupan. Visi/konsep kehidupan ini biasanya menjadi bagian kehidupan itu sendiri, dipatuhi dan dipraktekkan dalam kehidupan nyata dari hari kehari. Kehidupan dengan segala visi dan aturan/tata caranya, yang menjamin kepentingan/memberikan keuntungan hidup bersama tersebut, oleh para cerdik cendekia biasa disebut sebagai *budaya populer*. Budaya populer boleh dikatakan telah diterima sebagai tradisi pada keluarga, klan, suku dan bentuknya amat

beragam tergantung pada sejarah jangka panjang masyarakat itu.

Evolusi kehidupan kemasyarakatan moderen, dengan bentuk institusi kemasyarakatan moderen, pada dasarnya adalah organisasi moderen yang makin lama makin sempurna mengikat segenap aspek kehidupan. Di sisi lain dari evolusi kehidupan masyarakat tersebut, yang pada dasarnya adalah organisasi kekuasaan, telah mengubah kehidupan budaya masyarakat perdesaan dan perkotaan/metropolitan, menjadi makin seragam dan "universal" (termasuk agama besar dan ideologi). Dalam sosiologi dikenal sebagai *mimétisme*, padanan kata Indonesiannya: *penyeragaman massal* dalam kehidupan budaya, di mana sebagian besar penduduk bertingkah laku seragam. Dengan kata lain, mekanisme kekuasaan dan "nilai-nilai universal" ini, secara bertahap meniadakan berbagai budaya populer. Budaya moderen yang kemudian menggantikan dalam skala internasional serta sangat terorganisasi, dikenal sebagai budaya massa.

Budaya massa memiliki sifat universal yang tidak lagi memenuhi kepentingan kelompok khusus. Ia tidak selalu kompatibel dengan budaya populer, yang memiliki spesifikasi tertentu, sesuai dengan situasi dan kondisi yang membentuknya. Selain itu, budaya massa lebih banyak didukung oleh kaum terpelajar dan birokrasi institusi moderen (kaum elite), sedangkan budaya populer lebih hidup pada institusi tradisional. Pada budaya massa, kita bertemu dengan kehidupan satu masyarakat *spectacle*, yang bukan hanya lahir akibat tirani televisi, tetapi ia justeru adalah seluruh sistem ekonomi, sosial dan politik kapitalisme moderen yang dibangun berdasarkan transformasi individu sebagai penonton pasif berbagai pergerakan dan perubahan yang terlihat menonjol. Dalam *société du spectacle* ini, semua anggotanya hanya tinggal *bengong*, pasif menonton kegiatan keseharian mereka yang disuguhkan oleh televisi.

Sistem tadi telah memisahkan dan mengucilkan setiap individu, justeru ketika mereka berada di dalam kelompok/masyarakat yang *spectacle*. Ketika kita mengacu pada *spectacle* sebagai sesuatu yang meriah, ramai dan sesuatu tontonan, maka filsuf revolu-

sioner Perancis yang mati muda, Guy Debord, melihat bahwa tontonan moderen tadi ibarat nyanyian hiruk-pikuk tapi tidak ada yang bernyanyi, seperti Illiade (cerita kepahlawanan Yunani tentang dewa Homère, berisi 24 nyanyian terutama episode perang Troya atau Illion, juga tentang Achilles dan khususnya tentang pertenggaran perihal konsep perang) beserta orang-orang dan senjatanya, kendati *toib* memperlihatkan kemeriahan dan kegarahan mereka. Kepasifan tadi menyebabkan kepentingan masyarakat setempat tidak lagi ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, melainkan oleh pusat kekuasaan (*métropole*). Misalnya, kebutuhan dan kepentingan masyarakat pegunungan Cartenz (Irian Jaya) tidak lagi ditentukan oleh penduduk setempat melainkan oleh kepentingan kekuasaan politik-ekonomi di New York, London, Paris atau Tokyo, antara lain via Freeport. Budaya massa tidak saja melenyapkan budaya populer melainkan mengganti kepentingan nyata dengan kepentingan semu, yang sebenarnya bukan miliknya, melainkan kepentingan kekuasaan yang jauh di belahan bumi lain.

Masalah lain dari budaya massa adalah perwakilan bahasa, terutama masalah kemampuan bahasa dalam mewakili realita. Aristoteles, misalnya, selalu mengingatkan agar deskripsi bahasa atas realita sebaiknya kerap kali ditinjau ulang untuk menghindari kesesatan. Pembicaraan tentang budaya massa menyangkut pula penggunaan bahasa, karena kata massa, misalnya, menunjukkan jumlah banyak orang. Ini menyebabkan kita terlibat dalam masalah statistik, silogisme berpikir, mekanisme bahasa, referensi konseptual, fiksi, masalah representasi, imajinasi dan kenyataan. Sehingga apabila kita mengamati proses kelahiran budaya massa kolonial, maka uraian budaya tersebut hanya akan memadai kalau menyertakan berbagai konteks kehidupan budaya selama 350 tahun, di antaranya aspek pemaksaan oleh kekuasaan riil kolonial melalui berbagai institusi kolonial antara lain, *Politteke Inltictingen Dienst* (PID), hukum, pendidikan, penjara, tentara, teror, dan kekejaman. Kita temukan, bahwa tidak cukup membahas budaya massa hanya melalui pengertian kuantitatif, tetapi ia juga harus menaruh konteks peranan

sistem yang membentuknya, yaitu secara berurut: feodalisme, kolonialisme, autoritarisme, modernisme dan kapitalisme.

Hampir semua ensiklopedi memberi definisi *sistem* sebagai sebuah *jaringan* (*reseaux*) organisasi kemasyarakatan yang dipaksakan kepada manusia dan dengan demikian manusia terkungkung di dalamnya. Konsekuensinya, setiap sistem lalu memiliki mekanisme otonom, yang tentu saja dominan dan otoriter (untuk hidup di dalamnya, semua orang tanpa kecuali harus mengikuti kaidah-kaidah yang dimiliki sistem tersebut). Semisal sistem kapitalis, ia pun mempunyai ciri sebagai *kungkungan ekonomi kapitalis* atas masyarakat. Realitas dari sistem tersebut, antara lain memiliki ciri khas pada bangunan ekonomi, politik, sosial dan budayanya. Sebagai contoh: *Solvabilitas*, *rentabilitas* dan *likuiditas* menjadi satu-satunya ukuran bagi institusi-institusi ekonomi untuk tinggal, berkembang, atau lenyap. Bangunan sosialnya sendiri, berdasarkan hubungan penggajian, konsentrasi kekayaan dan berdasarkan kelompok elite yang dominan. Bangunan budayanya, berciri dominasi ekonomi pada semua aspek kehidupan, konsumerisme dan gengsi/prestise sosial. Bangunan politiknya menunjukkan pentingnya peranan *super power* dan organisasi internasional dalam menyelesaikan masalah.

Secara teoritis, budaya massa tidak dapat lagi diartikan sekadar satu budaya yang *abstrak* dan *imajiner*. Budaya massa adalah sistem (*orde*) di mana dominasi sistem tertentu (misalnya: ekonomi kapitalis) dalam kehidupan budaya masyarakat sehari-hari adalah praktek yang *nyata*. Dengan kata lain, budaya massa adalah budaya yang dominan, yang dipaksakan oleh sistem dan perangkat kekuasaan yang mendukungnya; dan secara pasti budaya massa ini akan meniadakan pelbagai budaya populer yang tidak sepadan dengan mekanisme sistem tersebut.

Jalan Panjang Budaya Massa Indonesia

Sebelum abad ke-16, atau sebelum para saudagar Arab dan kemudian pedagang beserta aparat kolonial Eropa tiba di Nusantara, Indonesia yang menghasilkan rempah-rempah, kamper dan kayu cendana telah menjalin

perdagangan dengan dunia luar melalui pelayar handal pribumi dan juga lewat para saudagar India. Hubungan dagang itu lalu menjadi hubungan *sejarah*, karena saudagar India juga sekaligus menyebarkan dua agama besar: Hindu dan Budha. Peninggalan peradabannya bahkan masih dapat ditemukan hingga hari ini, misalnya: tradisi dan budaya Bali, candi, sistem pengairan, sistem bercocok tanam menetap dan peninggalan budaya dominan yang berdasarkan sistem pembagian kasta. Secara garis besar, peradaban India telah mengubah masyarakat Nusantara dari masyarakat pengembara yang dekat dan akrab dengan lingkungan kehidupannya menjadi masyarakat yang relatif terorganisasi kehidupan sosialnya, yaitu dalam bentuk kerajaan.

Sejauh mana penetrasi peradaban India (sistem kasta) di dalam kehidupan sosial manusia Nusantara? Jawabannya cukup pelik, tetapi beberapa etnolog telah menyimpulkan bahwa peradaban India hanya berhasil menyentuh kelas atas, sedangkan kelas bawah masyarakat tetap berusaha memegang budaya populer atau budaya asli.

Kalau saja *Nagarakertagama* dapat menjadi pedoman rekonstruksi kehidupan sosial-budaya masyarakat Nusantara pada dan atau sesudah periode hindunisasi, maka perubahan penting adalah pada kehidupan masyarakat sebelum abad X. Masyarakat yang semula berkelompok dalam desa dan memiliki budaya relatif merdeka terhadap kekuasaan, lalu menjadi kehidupan sosial yang sentralistik; pemerintah pusat menentukan para kepala desa dan penduduk berada di sebuah *piramida hirarki* kekuasaan dengan raja dan sekaligus dewa berada di puncak. Masyarakat secara umum dibagi dalam satu sistem kasta yang sakral, berdasarkan pembagian kerja, dan berlaku turun-temurun. Di puncak terdapat tiga kasta kalangan atas (*triwangsa*) yaitu *brahmana*, *ksatria*, *waisya* (pendeta/pendidik, pemerintah/tentera, pedagang) yang mendominasi secara sah dan total masyarakat mayoritas (*sudra*) atau 90 persen dari total penduduk. Dengan kata lain budaya massa yang eksis di Nusantara waktu itu adalah budaya kasta/feodal.

Baru di penghujung abad ke-13, hubungan *teologi* antara Nusantara dengan dunia Islam

menjadi kenyataan yaitu melalui para pedagang Gujarat, Arab dan Sind (di Pakistan). Pedagang Arab pada zamannya berhasil memonopoli perdagangan antara Asia dan Eropa. Dengan kata lain islamisasi Nusantara berhubungan erat dengan pembangunan perdagangan yang dikerjakan para saudagar tersebut. Tentu saja, agama baru yang disebarkan sudah berasimilasi dengan beberapa ritus asli dari India. Dengan demikian, agama Islam yang muncul di Nusantara memiliki sifat-sifat *populis/egaliter*, sederhana dan sangat luwes dalam beradaptasi dengan kondisi lokal. Islam saat itu menerima hidup berdampingan dan rukun dengan kepercayaan sebelumnya. Perubahan nyata akan kepercayaan satu Tuhan telah menggantikan kepercayaan pada banyak Tuhan, ditambah lagi dengan faham masyarakat tanpa kasta; maka semuanya dapat disebut sebagai hasil interaksi masuknya Islam ke Nusantara, kendati kenyataan kehidupan sehari-hari dan budaya populer berjalan tidak berbeda jauh dengan produksi masyarakat feodal periode hindunisasi sebelumnya.

Hubungan *kolonial* sendiri bermula ketika para saudagar Eropa berniat melakukan hubungan langsung perdagangan rempah-rempah ke Nusantara, menggantikan para saudagar Islam yang sudah ada selama itu. Spanyol, misalnya, pada November 1521 membuka jalur langsung tersebut, disusul Portugis kepada Sultan Tidore, dan terakhir pembentukan VOC (perusahaan umum Belanda untuk Hindia Timur) Maret 1602. Kolonialisme Belanda juga memiliki usaha sampingan yaitu menyebarkan agama Kristen sekaligus "membudayakan" bangsa-bangsa Timur yang dipandang masih rendah tingkat budayanya. Namun usaha-usaha niaga yang menjadi tujuan pokok, tetap berupaya memonopoli perdagangan dalam bentuk koloni, persisnya untuk menguasai sumber barang-barang dagangan guna dijual ke pasar Eropa. Arus zaman kolonial juga marak bersamaan dengan terbitnya karya Jules Ferry (1890) yang menyatakan bahwa untuk menjadi bangsa-bangsa besar, "*harus menaklukkan tanah-tanah (negeri-negeri jajahan) baru.*" Anjuran tersebut bak gayung bersambut bagi orang-orang Eropa, mengingat pada 1815-1850 Eropa baru saja pulih dari babak-belur berbagai perang di "benua tua"

itu. Niat menaklukkan tersebut juga seiring dengan alasan-alasan ekonomi, ideologi, politik dan strategi. Bangsa-bangsa Eropa, yaitu Inggris, Perancis, Spanyol, Portugis, Belanda, Jerman, Italia dan Belgia, dalam upayanya kemudian berjaya menaklukkan Amerika, Afrika dan sebagian besar Asia.

Penjajahan Belanda atas Indonesia selama 350 tahun, dinilai oleh beberapa ahli sebagai eksploitasi ekonomi paling efisien dan mantap bila dibandingkan dengan penjarahan atas koloni-koloni bangsa Eropa lain. Simak misalnya, karya J.W.B. Money (1861) berjudul "*Java: How to Manage a Colony*" yang memberikan angka-angka perbandingan antara India dan Jawa untuk tahun 1856/57 sebagai berikut: jumlah penduduk India 12 kali penduduk Jawa (132.000.000: 10.800.000) dan luas tanah India 16 kali lebih besar dari Jawa; padahal pendapatan *The Anglo Indian* hanya 4 kali lebih besar daripada *Netherlands Indie*. Pajak tak langsung per penduduk di Jawa pun ternyata besarnya 4 kali lipat lebih banyak daripada India.

Merujuk kembali kisah masyarakat moderen Indonesia yang pada awalnya memiliki dan berusaha mempertahankan kebhinnekaan kulturalnya, dalam perjalanan sejarahnya hingga periode kolonisasi, ternyata secara garis besar ia selalu mengalami benturan tidak seimbang antara kekuasaan/mekanisme akumulasi kekuasaan, sistem kolonial dengan dinamika agen-agen sosial. Misalnya gerakan *Jawa Dwipa* yang menolak sistem kasta dalam praktik pemakaian bahasa Jawa dan menolak pula kolonialisme, akhirnya berhasil dipatahkan oleh kekuasaan kolonial dengan mudah dan efisien. Sistem feodal selama ratusan tahun di dalam pengorganisasian masyarakat melalui sistem kasta dengan hirarki amat ketat, yang mana kebenaran atau wewenang hanya pada kasta lebih tinggi dan perbenturan tidak berimbang antara kekuasaan legitim/kolonial dengan dinamika agen sosial; semuanya lalu melahirkan sebuah hubungan kekuasaan simbolik yang memustahilkan timbulnya kesadaran akan hak dan kewajiban yang setara pada kasta-kasta rendah. Akibat akumulasi kekuasaan yang tidak berimbang ini terbentuk berbagai *kebiasaan, tingkah laku, struktur mental* dan budaya massa masyarakat moderen In-

donesia, seperti: orientasi kepada status yang diwarisi, enggan menerima realita, gemar memamerkan status, percaya pada penyelesaian masalah yang bersifat magis/upacara, tidak suka pada perubahan/kemajuan atau suka menjaga *pakem*, gemar menggunakan kekuasaan/wewenang dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, mementingkan keekaan/keseragaman, memuja masa lalu, tradisi berlawanan secara simbolik dan *absurd* dan menilai bahwa kebenaran dan monopoli ilmu pengetahuan hanya ada pada kasta yang lebih tinggi.

Dengan kata lain, budaya massa masyarakat moderen Indonesia, yang boleh disebut sebagai budaya feodal-kolonial hanya mengenal *kewajiban, pengorbanan* dan tidak layak untuk meminta *hak/kepentingan* pribadinya. Secara lebih tajam kita dapat katakan bahwa budaya massa moderen Indonesia yang seragam dan *lego-lilo nrimo ing pandum* berkorban untuk kasta yang lebih tinggi tadi, hanya mengingatkan kepada bentuk budaya masyarakat *budak belian* di zaman kuno/Eropa abad pertengahan. Tengoklah sejarah Indonesia tatkala kaum kolonial Belanda mencengkeramkan kuku kekuasaannya di Nusantara, terlihat bagaimana eksistensi sistem kasta di kawasan khatulistiwa tersebut sangat menguntungkan bagi sistem kolonial, yang bahkan melanggengkannya secara amat efisien, sepanjang 350 tahun. Seringkali penjajah bersekutu dan bekerja sama dengan kelas bangsawan/priyayi dalam mempraktekkan budaya massa feodal-kolonial sembari melakukan penindasan dan pemakaian kekerasan untuk tetap memelihara stabilitas, yang berarti memelihara dominasi terhadap berbagai agen sosial yang ingin memperjuangkan kepentingan penduduk Nusantara. Dominasi kekuasaan fisik dan sistem simbolik atas budaya populer yang kadang-kadang memiliki kekuatan emansipatoris, mutlak perlu dipelihara, agar dapat melakukan *eksploitasi* terhadap kekayaan alam dan manusia Indonesia bagi kepentingan *akumulasi* kekayaan penjajah. Eksploitasi itu berupa Tanam paksa, pelayaran *Hongi*, penambangan emas, batubara, minyak dan kekayaan bumi lainnya, perampasan harta benda milik masyarakat, kerja rodi, kehidupan sebagian besar rakyat yang seng-

sara, kerja paksa dan tiadanya hak atas keadilan-pekerjaan-kehidupan yang layak. Di sini termasuk pula politik *Etis* dan *relokalisasi industri* yang juga diupayakan bagi kepentingan akumulasi kekayaan penjajah, meskipun baik yang pertama maupun yang kedua memiliki penyebab yang berlainan. Politik *Etis* dimaksudkan bagi pemenuhan kebutuhan kerani di Hindia Belanda yang makin meningkat biayanya kalau harus didatangkan dari Belanda. Sementara relokalisasi industri, terjadi akibat adanya *depresi besar*; ekspor Hindia Belanda merosot dari 1.488 juta gulden (1929) menjadi tinggal hanya 505 juta gulden (1935). Barang yang semula diimpor dalam waktu lama dari Belanda dengan ongkos angkut yang tinggi, kini dengan relokalisasi industri menyebabkan konsumen di Hindia Belanda bertambah dan diuntungkan karena barang diproduksi secara lokal.

Penguasa kolonial Jepang yang kemudian menggantikan Belanda untuk menjajah Nusantara selama 3,5 tahun pada dasarnya menjalankan sistem kolonial yang tidak jauh berbeda dengan Belanda. Mungkin dalam soal kekejaman (kerja paksa, *romusha*) berkadar lebih tinggi, juga dalam kerakusan merampok milik penduduk Nusantara. Kalau mengamati Jepang lebih jauh maka kita akan temukan bahwa: "*Negara Dai Nippon berdasar atas persatuan lahir dan batin yang kekal antara yang Mahamulia Tenno Heika, negara dan rakyat Nippon seluruhnya. Tenno adalah pusat rohani dari seluruh rakyat. Negara bersandar atas kekeluargaan. Keluarga Tenno yang dinamakan "Koshitu" ialah keluarga yang terutama. Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai pula dengan corak masyarakat Nusantara*" (dikutip dari pidato Soepomo, 31 Mei 1945).

Sistem kolonial Jepang ternyata sangat sepadan dengan budaya massa masyarakat Nusantara yang merupakan produksi masyarakat yang ideal/berhasil, campuran antara sistem feodal dan kolonial. Di pihak lain, pemecahan masalah melalui adu kekuatan/perang serta sistem pemerintahan Dai Nippon yang diktatur-feodal, telah menambah unsur sintesa pada pandangan ideal masyarakat moderen Indonesia perihal kekuasaan. Sintesa itu adalah *unifikasi* sempurna dari unsur

feodal, kolonial dan diktatur yang kemudian membentuk diri menjadi reproduksi pola utama sistem kekuasaan dan struktur mental serta budaya massa kaum elite dari masyarakat moderen Indonesia.

Dominasi *sistem feodal-kolonial-diktatur* beserta seluruh sejarah jangka panjang interaksi kelembagaannya yaitu kekuasaan kolonial dengan masyarakat, hubungan negara kolonial dengan lembaga-lembaga kerajaan Belanda/kekaisaran Dai Nippon, dinamika berbagai kelompok dan klas sosial dalam pergerakan kemerdekaan, hubungan penggajian dan bentuk persaingan aktor ekonomi; semuanya telah mengantar rakyat ke kehidupan berkebudayaan massa yang amat mengerikan dan secara sosial-ekonomi-politik menyengsarakan. Tetapi, kesengsaraan tersebut juga mendorong kesadaran politik dan dinamika berbagai kelompok dan kelas sosial di masyarakat Indonesia ke dalam pergerakan kemerdekaan yang menolak sistem kolonial beserta warisan akumulasi budaya. Ini juga bermakna bahwa selain menolak sistem eksploitasi, masyarakat juga menolak sistem perbudakan dan berusaha menemukan kembali kemerdekaan & kebhinnekaannya. Hasil akhir perjuangan: proklamasi 17 Agustus 1945, adalah masyarakat merdeka, termasuk budaya merdeka dan kebhinnekaan budaya.

Namun, sejarah perjalanan hidup bangsa melalui rentang waktu ratusan tahun di dalam sistem produksi dan reproduksi masyarakat berkasta, penjajahan dan perbudakan, telah mengakibatkan berbagai rintangan dan kesulitan bagi pemerintah dan warga negara sesudah kemerdekaan, untuk membangun sebuah masyarakat Indonesia Baru yang benar-benar merdeka dan bhinneka. Kenyataannya, budaya massa yang menampakkan diri melalui tradisi-tingkah laku-struktur masyarakat masih tetap saja *feodal-kolonial-diktatur* dan hal ini masih merupakan aspirasi sebagian besar agen sosial masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan.

Belum lagi selesai dengan tugas-tugas mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan yaitu membangun *budaya massa baru* yang benar-benar bertolak belakang dengan hasil produksi dan reproduksi masyarakat Indonesia, yaitu budaya *feodal-kolonial-diktatur*,

pemerintah tidak memiliki pilihan lain dari pada melakukan pembangunan ekonomi, yang berarti mengkaitkan diri ke dalam orde ekonomi mondial, yang kapitalistis.

Akibatnya, masa transisi yang menandai kehidupan masyarakat kita dewasa ini, selain masih *eksis* masyarakat *feodal-kolonial-diktatur* hasil produksi masyarakat ratusan tahun yang lalu, *eksis* juga masyarakat kapitalis, dengan seluruh ciri-ciri khususnya, seperti: hak eksklusif dan sifat rivalitas, yang ternyata amat mengagetkan masyarakat kita, yang sejak dulu hanya mengenal hak bersama dan persaudaraan antarmasyarakat. Lantas, masyarakat mendapatkan lagi bahwa kehidupan nyata sehari-hari amat didominasi oleh keputusan keuangan/dominasi ekonomi dalam masalah kultural, masyarakat konsumerisme dan kekayaan sebagai prestise sosial. Dengan kata lain, masyarakat transisi ini benar-benar mewakili sisi budaya gabungan, dengan unsur budaya yang terjelek dari masyarakat *feodal-kolonial-diktatur* ditambah unsur budaya yang terjelek masyarakat kapitalis.

Karena itu, pada masa transisi ini paling tidak telah terjadi 3 proses yang penting dalam masyarakat Indonesia, yaitu: *subordinasi struktural* masyarakat terhadap sistem baru yang dikenal sebagai *sistem kapitalis*, pengkristalan dan pengkekalan budaya feodal-kolonial-diktatur (*konservatisme*), dan produksi kepercayaan bersama bahwa nilai-nilai *feodal-kolonial-diktatur-kapitalis* adalah baik adanya. Konsekuensinya, lahir budaya massa baru yang sangat mengerikan, merupakan adonan unsur-unsur terburuk dari *feodal-kolonial-diktatur-kapitalis*. Sehari-hari dengan mudah ditemukan bentuk-bentuk perlakuan semena-mena terhadap orang miskin, hipokrit, tidak senang melihat orang lain berhasil, berbeda pendapat dianggap melawan dan berbahaya, sangat kejam terhadap rakyat kecil, menjilat kepada kasta yang lebih tinggi, memaksakan kehendak, mudah tersinggung, tidak menghormati aturan yang sudah disetujui dan ditetapkan bersama, dan lain-lain.

Budaya massa yang mengerikan ini, terutama justeru terdapat pada lapisan masyarakat menengah ke atas, di metropolitan, juga celaknya hadir pula pada tingkat kaum terpelajar dan seniman, terutama dalam bentuk

fatalisme kehidupan (takdir) dan repetisi/pembakuan *pakem*. Sementara itu, pada kehidupan suku, daerah dan klan makin sedikit anggota masyarakat yang tegar menjaga budaya populer (seperti: persaudaraan, keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan lain-lain) dan mempraktikkannya. Usaha masyarakat Indonesia mempertahankan budaya merdeka dan menghormati kebhinnekaan budaya sampai saat ini belum berhasil. Meskipun perjuangan untuk itu telah dilakukan dalam waktu yang lama, namun budaya massa produksi sistem dominan selalu berhasil menghancurkan hasrat dan pengalaman hidup sosial sejumlah besar manusia Indonesia yang justeru ingin tetap mempertahankan *hak budaya* (budaya populer) berciri kebhinnekaan. Perlawanan manusia Indonesia terhadap sejarah *mekanisme penunggalan* masyarakat, yang di antaranya berbentuk *produksi* dan *reproduksi* masyarakat Nusantara melalui mesin-mesin feodalisme, kolonialisme, modernisme dan otoritarisme, masih panjang dan sulit. Namun, sebagai layaknya zaman transisi, maka budaya massa transisi pun mengenal masa hidup yang terbatas, dan untuk mengakhirinya adalah pekerjaan rumah utama kaum cerdas pandai dan para pemimpin pemerintahan untuk memproduksi kembali masyarakat moderen Indonesia yang memenuhi aspirasi bagian terbesar warganegara mempertahankan budaya populer yang merdeka-bhinneka.

Guy Debord banyak terpengaruh pemikiran Georg Lukacs, bahwa satu-satunya cara masyarakat penonton melawan *kebengongan* mereka akibat transformasi budaya adalah dengan berjuang menghapuskan pemisahan antara hasil dan si penghasil, antara keputusan dan pelaksanaan. Hal ini hanya mungkin terlaksana di dalam *communauté*. Sebab terdapat kesamaan dan kebersamaan kemanusiaan, berdasarkan pengalaman langsung yang nyata, ada suatu dialog yang benar antara setiap anggotanya, serta satu kegiatan yang sama untuk memecahkan sebuah problem. Guy Debord, pemikir radikal tentang media-massa moderen yang lebih sering terkucil di lingkungannya tersebut, bahkan mencoba menggambarkan bagaimana mestinya sebuah komunitas yang otentik seperti masa lalu, yaitu suatu *polis* ala Yunani, desa-desa, bentuk

republik Italia abad pertengahan, perempatan-perempatan, juga kedai-kedai rakyat. Debord melihat dengan gamblang perbedaan antara *société* dan *communauté*, yang dirangkainya dalam pengertian makna *spectacle*, yaitu *une société sans communauté*, satu masyarakat tanpa kesamaan.

Tindakan ini berarti memberi kesempatan kepada lahirnya manusia dengan budaya massa baru yang *toleran, peduli dan sensitif* terhadap penderitaan orang lain. Sehingga lama kelamaan, budaya populer, yang unggul, berbeda dan sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing desa, suku, klan, keluarga, kembali hidup dan memberikan keuntungan kehidupan sosial bersama.

Bahaya Dominasi Total Kehidupan Budaya Massa

Budaya massa saat ini pada dasarnya tidak dapat lagi diartikan dalam pengertian yang netral, apalagi positif. Bukan saja disebabkan oleh keterikatannya yang hampir abadi, dengan sistem totaliter, yang *nota bene* adalah musuh bebuyutan peradaban manusia, yaitu tirani (totalitarisme). Budaya massa adalah hasil produksi dan reproduksi berbagai sistem totaliter itu sendiri dalam bentuknya yang sama sekali tidak berbeda dengan penciptanya, yaitu totaliter. Sehingga berbagai definisi budaya (termasuk budaya massa) yang bernada positif atau netral banyak diartikan oleh para ilmuwan Anglo-Saxon, misalnya sebagai: "*konfigurasi berbagai tingkah laku yang dipraktikkan dan berbagai produksi hasil tingkah laku yang diterima dan beredar dalam sebuah masyarakat tertentu.*" Definisi Durkheim, "*budaya bukan hanya produksi masyarakat, tetapi masyarakat itu sendiri yang memilib sistem yang memungkinkan sirkulasi dan transformasi berbagai barang dagangan, yang berbentuk mitos-mitos, berbagai kata, peran wanita atau barang-barang yang diproduksi,*" sudah layak ditinjau kembali penggunaannya.

Sisi negatif lain yang berkaitan erat dengan korban atas pembentukan budaya massa itu yaitu: *pertama*, indoktrinasi ideologi dan pembentukan elite yang mendukungnya, yang kemudian menjelma menjadi kekuatan penin-

das yang mengatas-namakan budaya massa. *Kedua*, penggunaan teror baik cara kuno maupun cara moderen dalam menegakkan stabilitas yang diperlukan agar sistem berjalan dengan baik. Proses ini kelak akan menghasilkan *masyarakat berdimensi tunggal* atau masyarakat berbudaya massa yang acuh dan pasif pada penderitaan sesama dan memusuhi sesama warga negara tanpa alasan.

Tetapi bahaya terbesar budaya massa, *pertama* adalah tidak memungkinkan eksistensinya budaya populer yang tidak sepadan dengan budaya massa; *kedua*, tidak mungkin adanya kepentingan khusus atau budaya alternatif yang sesuai dengan kebutuhan khusus masyarakat. Ini berarti, kepentingan masyarakat/warga negara harus tunduk pada kepentingan budaya massa yang *nota bene* adalah kepentingan kekuasaan feodal, kolonial, diktatur dan kapitalis. Akibatnya, baik ingatan pribadi maupun ingatan bersama tentang kesadaran moral, etika, ajaran sosial agama yang merupakan hasil kerja ribuan tahun sejarah kehidupan ideal bersama dan merupakan akumulasi terpenting sejarah kebijaksanaan manusia dalam kehidupan bersama, mustahil dipraktikkan, seperti: persaudaraan, keadilan dan kebebasan.

Manifestasi bahaya budaya massa pada umumnya tampak dalam bentuk sedikitnya kesempatan individu memperjuangkan kepentingannya, kata-kata dan bahasa yang kehilangan makna, media massa yang menyebarkan pendapat yang seragam, dan munculnya lingkaran setan robotik di mana manusia tidak mampu tampil sebagai manusia utuh dengan peradaban kemanusiaannya. Fenomena tersebut dapat dengan mudah dijumpai dalam kehidupan metropol di seluruh dunia sebagai tanda dominannya budaya massa abad ini.

Apakah individu mampu melawan kepentingan sistem totaliter (feodal, kolonial, diktatur dan kapitalis global)? Apakah ada sarana untuk keluar dari tirani budaya massa, misalnya penolakan terhadap kultur kapitalis. Se cara teoritis hal itu dimungkinkan kalau masyarakat memiliki *kesadaran dan waktu*. Iklan di televisi, misalnya, penonton hanya mampu untuk tidak membeli barang-barang yang diiklankan di TV kalau ia mempunyai waktu untuk berpikir dan menggunakan ke-

sadarannya. Sebab, bahaya terbesar dari budaya massa adalah "percepatan waktu" yang menyebabkan individu terputus dari masa lalu dan masa depannya, karena itu ia tidak dapat lagi menggunakan kesadaran, akal sehat, pengalaman hidup, etika dan sebagainya, sebelum mengambil keputusan. Ia telah menjadi *manusia berbudaya massa hari ini*.

Dalam kehidupan moderen awal abad ke-21 mendatang, ternyata *etik larut di dalam estetika*. Artinya, mustahil manusia moderen mengabaikan etik apabila ia masih menginginkan suatu yang indah dan bagus dari dan tentang apa saja dalam keseharian insani. Ternyata manusia hanya merasa hidup budayanya bahagia sempurna bukan di dalam tatanan efisiensi berkarya dan efisiensi waktu, tetapi justru di dalam tatanan saling menghargai, kesamarataan individu dan keadilan. Di dalam estetika, manusia merasa hidup dalam komunitas, dalam kesamaan, tidak terkucil. Ia terdorong untuk aktif, bukan *bengong* sebagai "cuma penonton" justru di dalam masyarakatnya sendiri.

Diperlukan faktor-faktor lain sebagai syarat perjuangan seperti kesadaran politik, waktu, pengalaman hidup menderita, semangat sisipus, kehidupan demokratis, tradisi berpikir bebas, tradisi melawan, berani menolak tabu, sensibel terhadap penderitaan, pengetahuan dan pemahaman atas etika, tradisi budaya toleran, berbagai praktik peradaban manusia dan aspek positif budaya populer itu.

Perlawanan terhadap Budaya Massa

Di Indonesia, perlawanan terhadap budaya massa beserta sistem yang membentuknya telah memiliki sejarah panjang dengan pengalaman riil kemanusiaannya. Tapi, lebih penting adalah perlawanan tersebut mengalami perubahan bentuk sesuai dengan antisipasinya terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan kemanusiaan.

Beberapa perlawanan seperti gerakan Jawa Dwipa, yang menolak penggunaan jengjang bahasa sesuai dengan tingkat masyarakat, sastra Saijah dan Adinda karya Multatuli; kumpulan surat R.A. Kartini berjudul *Habis Gelap Terbitlah Terang*, oposisi lokal dan

bawah tanah periode 1942-1945, pembaruan radikal wayang kulit oleh Kasman, hadirnya Serikat Buruh Merdeka Setiakawasn dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Aliansi Jurnalistik Indonesia, dan perlawanan setiakawan Kedung Ombo. Sementara itu, dapat pula diketengahkan contoh perlawanan budaya di zaman kemerdekaan di mana sejarah mencatat bahwa para pejuang tidak saja antibudaya kolonial tetapi mereka betul-betul menanggalkan budaya feodal (kasta) dan secara sadar mempraktikkan budaya republikan, setiap orang sama kedudukannya.

Bila kita sempat melakukan studi serius mengenai perlawanan terhadap budaya massa, maka akan dipahami bahwa seluruh perlawanan itu, secara umum dijiwai oleh *la conscience possible*, yaitu harapan, semangat dan upaya menemukan sejauh mungkin suatu kondisi terbaik terhadap kenyataan riil. Dalam penerapannya di negara Dunia Ketiga (termasuk Indonesia), kerjasama internasional, *la conscience possible*, bersama-sama dengan pengalaman pahit kehidupan berkebudayaan massa tiranik, hingga saat ini ternyata tidak memadai dalam mendekati berbagai budaya populer sebagai *das sollen* dan sekaligus menjadikannya sebagai konsep ideal budaya massa, dalam arti menolak budaya massa saat ini sebagai *das sein*. Misalnya, budaya massa yang dengan mudah dijumpai dalam kehidupan masyarakat, tidak lain adalah gabungan ciri-ciri berbagai budaya masa hasil produksi dan reproduksi sistem masyarakat feodal-kolonial-diktatur-kapitalis.

Untuk mencerahkan persoalan itu, pertama-tama saya ketengahkan pendapat Paul Ricoeur mengenai *ideologi* (feodalisme, kolonialisme, totalitarisme dan kapitalisme). Ia mengartikan ideologi sebagai imajinasi sosial dan kultural yang perlu sebagai simbol pengikat masyarakat, di mana budaya massa menjadi salah satu komponennya. Menurut Ricoeur, dalam penerapannya, ideologi "ditakdirkan" menjalani jalur yang tetap, yaitu awalnya berfungsi sebagai integrasi sosial, selanjutnya digunakan sebagai legitimasi kekuasaan dan berakhir dengan distorsi sosial. Pendek kata, dominasi budaya massa dengan sistem ideologi yang membentuknya akan sampai pada tahapan distorsi sosial.

Namun, untuk menghindari proses tersebut, Paul Ricoeur menawarkan kegiatan-kegiatan dengan urutan: *thinking about the possible*, *challenge to the establishment* dan *escape*.

Tirannya budaya massa juga dilihat serupa oleh Umberto Eco. Dalam wawancara di televisi Prancis, Februari 1996, Eco menilai bahwa dominasi hanya terjadi bila orang memandang dan memperlakukan ideologi secara dogmatis. "Di dalam dogmatisme terdapat terorisme," katanya. Ketika kita hidup dalam teror terus-menerus, kata-kata menjadi tidak penting, dialog adalah sia-sia. Padahal, untuk menghindari distorsi sosial kita wajib "mendengar" untuk sampai kepada "mengetahui," dan di dalam mengetahui ini dogmatisme kehilangan kuasanya. Ini juga yang menyebabkan manusia tumbuh menjadi lebih toleran, aktif dan bukan *bengong* atas semua ketidakadilan, tidak terkucil kendati terpercili.

Masyarakat Eropa sampai sekarang dapat dijadikan contoh dalam keberhasilannya melawan dominasi sistem dan budaya massa kapitalis. Dalam melakukan evaluasi perlawanan mereka terhadap budaya massa dominan selayaknya kita tidak melupakan faktor-faktor keberhasilan industrialisasi, tradisi hak asasi manusia, *la conscience possible* warganegara dan penolakan pada dogmatisme. Karena, keempat faktor tersebut bersama dengan sistem demokrasi, secara dialektis menghasilkan sintesa proteksi sosial terhadap kekejaman budaya massa kapitalis dan sistem kapitalis.

Kesimpulan

Ada baiknya kita membicarakan budaya massa dalam konteks internasional dan jangka panjang karena ini adalah proses yang melibatkan perjuangan kepentingan abadi dan global. Sebagai patokan dapat dibicarakan sejarah panjang peradaban manusia dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, yang secara garis besar memiliki dua kecenderungan. *Pertama* masyarakat dibagi dalam kelas-kelas beserta perbedaan hak (masyarakat feodal, kasta, kolonial, diktatur). *Kedua*, masyarakat republikan di mana semua anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang setara. Kemudian sejarah moderen mencatat Nicollo Machiavelli yang menyatakan bahwa untuk memperoleh jaminan kemajuan masya-

rakat diperlukan penyerahan nasib dan usaha memajukan melalui kelas yang berkuasa dan masyarakat sisanya diharap pasrah. Pemikiran inilah yang menjadi dasar sistem moderen yang kemudian membentuk budaya massa untuk melanggengkan kekuasaan/dominasinya. Sementara itu pemikiran republik, memiliki contoh nyata dalam *Cité* (masyarakat kota Athéna sekitar setengah abad sebelum Masehi), dengan demokrasi langsung untuk menjamin kepentingan masyarakat.

Tetapi celakanya, perjalanan peradaban manusia ternyata lebih sering memberikan kemenangan pada pola pemikiran anti-republik, yang dalam kenyataannya secara bertahap mampu mendominasi kehidupan masyarakat moderen melalui akumulasi kekuasaan dan penyebaran budaya massa. Kenali budaya massa mutakhir yang eksis di Indonesia dan seluruh dunia, maka kita akan dengan mudah mendapati universalitas. *Pertama* dalam pengertian dan pengelolaan waktu (waktu adalah uang dan hanya diabdikan untuk keuntungan pribadi semata). *Kedua*, suasana dan genealogi pengambilan keputusan (keuangan/efisiensi adalah pertimbangan utama). *Ketiga*, kapasitas untuk hidup bersama (tentu saja dalam hal ini negatif karena hubungannya adalah eksploitatif). *Keempat*, dalam bidang komunikasi (hanya monolog, tidak mungkin terjadi dialog karena kedudukan klas sosial yang satu lebih tinggi dari yang lain). Fenomena-fenomena bersifat hegemonik beserta seluruh institusi represifnya ini, secara logis menjadi sebab perlawanan budaya populer yang sepadan dengan kepentingan beragam masyarakat. Kalaulah mampu melawan tidak dalam jangka panjang, setidaknya dalam jangka pendek, misalnya budaya perjuangan kemerdekaan Indonesia dan Gerakan Mei 1968 di Perancis.

Pertanyaannya kemudian, apakah masih ada jalan panjang untuk berlawanan terhadap budaya dominan agar manusia tidak hidup di dalam satu *société du spectacle*? Jawabannya bukan pada budaya populer. Dalam melakukan perlawanan haruslah betul-betul disadari oleh masyarakat dunia bahwa perjuangan tersebut adalah usaha yang aktif, serius, dan profesional, dengan mengingat *la conscience possible* sebagai senjata yang terpenting. ●